BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi

Secara etimologis, kata partisipasi berarti perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta.[15] Menurut Made Pidarta, partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung percepatan tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.[16]

Istilah partisipasi mengandung arti keikutsertaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia partisipasi adalah "sejumlah orang yang turut berperan dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta" Maksud partisipai disini adalah keikutsertaan, peran serta, atau keterlibatan seseorang baik secara perorangan maupun sebagai kelompok dalam suatu kegiatan tetentu.

Sedangkan menurut Huneryear dan Hecman partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi

---

[15] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 831

[16] Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan,* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hal. 50

kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka.[17]

Menurut Yusufhadi Miarso istilah "Partisipasi adalah keterlibatan secara spontan baik berupa pikiran, tenaga, barang ataupun uang yang disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan".

Pengertian diatas mengandung tiga gagasan yaitu keterlibatan, kontribusi dan tanggung jawab. Keterlibatan adalah keikutsertaan mental dan emosional yang tidak hanya menunjukkan keterlibatan fisik tetapi juga keterlibatan secara mental. Konstribusi merupakan pemberian kesempatan untuk menyalurkan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan tanggung jawab merupakan keharusan seseorang untuk melaksanakan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.

2. Pengertian Masyarakat

Adanya bermacam-macam wujud kesatuan kolektif manusia menyebabkan bahwa kita memerlukan beberapa istilah untuk membeda-bedakan berbagai macam kesatuan manusia tadi. Kecuali istilah yang paling lazim, yaitu masyarakat ada istilah-istilah khusus untuk menyebut kesatuan-kesatuan khusus yang merupakan unsur-unsur dari masyarakat, yaitu kategori sosial, golongan sosial, komunitas, kelompok dan perkumpulan.

---

[17] *Ibid.*, hal. 51

Masyarakat seperti yang disebutkan di atas, istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebutkan kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari, adalah masyarakat. Dalam bahasa inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata latin *socius*, yang berarti "kawan". Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti "ikut serta, berpartisipasi".

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. Suatu kesatuan dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya yang saling berinteraksi. Suatu negara modern misalnya, merupakan kesatuan manusia dengan berbagai macam prasarana, yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi secara intensif dan dengan frekuensi yang tinggi.

Tidak semua kesatuan manusia yang bergaul atau berinteraksi itu merupakan masyarakat, karena suatu masyarakat harus mempunyai suatu ikatan lain yang khusus. Ikatan tersebut yaitu pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu dan pola tersebut bersifat kontinyu dalam arti sudah menjadi adat-istiadat yang khas. Suatu masyarakat harus mempunyai ciri lain yaitu suatu rasa identitas diantara para warga atau anggotanya, bahwa mereka memang merupakan kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan manusia lainnya.

Dari uraian di atas maka definisi mengenai masyarakat dapat dirumuskan sebagai berikut: Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia

yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Adapun pengertian lain masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.[18]

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah, hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan perubahan itu. Zaman dimana masyarakat mengenal kehidupan yang teratur dan aman, disebabkan oleh karena pengorbanan sebagai kemerdekaan dari anggota-anggotanya, baik dengan paksa maupun sukarela. Pengorbanan disini dimaksudkan menahan nafsu atau kehendak sewenang-wenang, untuk mengutamakan kepentingan dn keamanan bersama. Dengan paksa berarti tunduk kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan (negara, perkumpulan, dan sebagainya), dengan sukarela berarti menurut adat dan berdasarkan keinsyafan akan persaudaraan dalam kehidupan bersama.[19]

Menurut Soerjono Soekanto, ada empat unsur yang terdapat dalam masyarakat, yaitu:

a. Adanya manusia yang hidup bersama, dua atau lebih.
b. Mereka bercampur untuk waktu yang cukup lama, yang menimbulkan sistem komunikasi dan tata cara pergaulan lainnya.
c. Memiliki kesadaran sebagai satu kesadaran.

---

[18] Hassan Sadilly, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 47

[19] *Ibid.*, Hal. 50

d. Merupakan sistem kehidupan bersama yang menimbulkan kebudayaan.[20]

3. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan peran serta atau keikutsertaan dan keterlibatan seseorang secara perseorangan atau berkelompok dalam suatu kegiatan. Conyer (1984) menjelaskan bahwa pendekaan dalam partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan.

Hubungan Masyarakat (Humas) menurut Nasution adalah segenap kegiatan dan teknik atau kiat yang digunakan organisasi atau atau individu untuk menciptakan atau memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan aktivitasnya.[21]

Penggabungan kedua istilah "partisipasi" dan "masyarakat" mengandung sejumlah gagasan dan rujukan khusus penggabungannya. Gagasan yang terkandung adalah peran serta semua anggota atau unsur yang terkait dalam melaksanakan suatu kepentingan bersama atau pekerjaan yang dimaksudkan untuk mempermudah tercapainya tujuan yang diharapkan. Sedangkan rujukan yang terkandung adalah wadah atau forum pertemuan: adanya keterbukaan dalam membahas persoalan, adanya interaksi dalam merumuskan tujuan dan cara menentukan yang terbaik,

---

[20] Ari H Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 4-5

[21] Zulkarnaen Nasution, *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan; Konsep, Fenomena dan Aplikasinya*, (Malang: UMM Press, 2011), hal. 9

adanya keputusan yang diambil bersama dan adanya pemantauan atau pelaksanaan keputusan.[22]

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Partisipasi masyarakat berarti keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti ide, saran, pendapat, dana, gagasan, keterampilan dan jasa. Keterlibatan mereka diarahkan dan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan hak dan taggung jawab dalam pendidikan. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat ini diharapkan dapat menyukseskan progam pendidikan yang telah dicanangkan, dengan kata lain, keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah diperlukan supaya sekolah dapat berfungsi dengan baik.

Kerja sama dengan orang tua murid umumnya didefinisikan sebagai usaha para orang tua murid untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar di sekolah dengan cara membantu belajar anak di rumah, mengawasi kegiatan anak di luar sekolah, menghadiri kegiatan-kegiatan sekolah yang sesuai, serta berkomunikasi dengan guru/ staff sekolah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah bentuk-bentuk partisipasi, keterlibatan, atau dukungannya sebagai anggota masyarakat bersama-sama pihak sekolah

[22] Yusufhadi M, *Manajemen Benih Teknologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 706

baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.[23]

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ditujukan untuk:

a. Terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan
b. Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak yang berkepentingan dengan pendidikan
c. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam (lingkungan) dan sumber daya buatan seperti dana, fasilitas dan peraturan-peraturan.
d. Meningkatkan kinerja sekolah, yang berarti pula meningkatkan produktivitas, kesempatan memperoleh pendidikan, keserasian proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kondisi anak didik dan lingkungan serta komitmen dari para pelaksana pendidikan.[24]

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di era otonomi ini merupakan wujud dari kesadaran masyarakat akan keberadaan lembaga pendidikan yang kemudian mendorong menjadi rasa tanggung jawab untuk menciptakan sumber daya berkualitas. Tumbuhnya partisipasi aktif untuk membangun pendidikan yang bermutu dan mandiri merupakan implementasi otonomi pendidikan sedangkan pemerintah hanya berfungsi

---

[23] Mansyur Ramly, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan,* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, 1986), hal. 185

[24] Yusufhadi M, *Manajemen Benih...,* hal. 709

sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat. Salah satu wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan dibentuknya komite sekolah.

4. Komite Sekolah

a. Pengertian Komite sekolah

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.[25]

Sedangkan menurut Hasbullah, komite sekolah yang berkedudukan disetiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintah.[26]

Setelah menelaah berbagai pengertian tentang komite sekolah, bahwa komite sekolah adalah suatu badan mandiri yang berfungsi sabagai forum resmi untuk mewadahi peran serta masyarakat, mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan.

---

[25] Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hal. 267

[26] Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 90

b. Tujuan Komite Sekolah

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (Dirjen Dikdasmen) tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:

1) Mewadahi, menyalurkan aspirasi dan prakara masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di suatu pendidikan.[27]

c. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

1) Peran Komite Sekolah

Keberadaan Komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002, diantaranya yaitu:

[27] Undang-Undang RI..., hal. 109

a) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
b) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam pemnyelenggaraan pendidikan.
c) Pengontrol (*contolling agency*) dalam rangka trasnparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
d) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dengan masyarakat,[28]

Sedangkan peran serta masyarakat sekolah melalui komite sekolah ditegaskan oleh Satori yang dikutip oleh Sagala harus pula diarahkan pada penciptaan budaya kelembagaan baru dalam pengelolaan sekolah yaitu, mencakup:

a) Komite sekolah merupakan patner sekolah yang secara bersama-sama mengupayakan kemajuan bagi sekolah itu. Program-program akademik yang ditujukan pada kepentingan para peserta harus mendapatkan dukungan dari komite sekolah dari komite sekolah, sehingga program tersebut dapat dilaksanakan dengan ketersediaan biaya yang diperlukan. Membangun saling pengertian yang baik, komunikasi yang sehat perlu dibangun antara sekolah dengan komite sekolah.

[28] *Ibid*., hal. 110

b) Pengembangan perencanaan strategik sekolah dengan merumuskan program prioritas sekolah, sasaran pengembangan sekolah, strategi pencapaian sasaran, pengendalian dan evaluasi pencapaian sasaran pengembangan sekolah, analisis kebutuhan dan penyusunan perencanaan dilaksanakan bersama komite sekolah.

c) Pengembangan perencanaan tahunan sekolah. Perencanaan ini merupakan penjabaran dari perencanaan strategik sekolah yang menggambarkan kegiatan-kegiatan operasional sekolah yang bentuk program sekolah disertai perencanaan anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS). Perencanaan tahunan disusun bersama komite sekolah.

d) Melakukan monitoring internal dan evaluasi dan *(internal monitoring dan self assesment)* secara reguler serta melaporkan dan membahas hasilnya dalam forum komite sekolah, dalam kegiatan ini perlu dirancang aspek-aspek apa saja yang menjadi perhatian, bagaimana format dan instrumennya, dan siapa atau gugus tugas yang melakukannya. Hasil internal ini sangat penting sebagai bahan untuk mengetahui kemajuan sekolah, hasil-hasil dan prestasi yang dicapai dan hambatan serta masalah-masalah serius apa yang dihadapi sekolah.

e) Menyusun laporan tahunan sekolah yang menggambarkan pelaksanaan perencanaan tahunan sekolah, Laporan tahunan

sekolah merupakan dokumen penting yang menjelaskan kondisi kemajuan sekolah. Bentuk laporan tahunan sekolah disesuaikan dengan perencanaan tahunan sekolah. Laporan tahunan sekolah adalah kesempatan bagi sekolah melepaskan pertanggungjawaban terhadap *stakeholder* sekolah khususnya orang tua. Melalui media ini mereka memperoleh informasi yang jujur, objektif dan dapat dipercaya mengenai kinerja sekolah dan hasil belajar siswa. Laporan tahunan sekolah yang telah dibahas dan mendapat penerimaan komite sekolah, selanjutmya disampaikan ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota setempat sebagai bahan untuk melakukan *review* sekolah.

f) Melakukan *review* sekolah. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengetahui kondisi objektif masing-masing sekolah dalam satu wilayah pembinaan. Jika diketahui ada sekolah yang maju pesat, melalui *review* sekolah dapat dipelajari kondisi atau faktor-faktor yang menyebabkannya. Sebaliknya, hasil *review* sekolah dapat dijadikan barang berharga untuk dikaji secara terbuka dan professional, sebagai bahan refleksi pembinaan sekolah. *Review* sekolah dapat dilakukan pada tingkat kecamatan untuk sekolah dasar dan tingkat kapubaten/ kota untuk sekolah menengah.

g) Melakukan survey pendapat sekolah terhadap *stakeholder* sekolah. Hasil survey ini menggambarkan posisi pendapat dan kepuasaan pada *stakeholder* mengenai apa yang telah dianggap baik dan hal-hal apa yang perlu perbaikan. Hasil survey pendapat sekolah dapat dilakukan setahun sekali. Hasilnya dapat dijadikan bahan masukan bagi pengembangan perencanaan strategik maupun perencanaan tahunan sekolah.

h) Menyelenggarakan "hari terbuka" (*Open day*) bagi orang tua dan masyarakat, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kehidupan internal sekolah. Melalui program *open day*, masyarakat dan orang tua dapat melihat fasilitas pendidikan, kondisi sarana prasarana sekolah, komitmen khusus sekolah, program-program unggulan sekolah, kondisi guru-guru dan tenaga staff usaha pendukungnya. *Open day* dapat dilakukan setahun sekali untuk membangun "*customer image"* terhadap sekolah dan dalam jangka panjang memperkuat akuntabilitas sekolah.

i) Memantau kinerja sekolah yang meliputi kinerja manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, mutu belajar mengajar termasuk kinerja mengajar guru, hasil belajar peserta didik, disiplin dan tata tertib sekolah, prestasi sekolah, baik dalam intra maupun ekstrakurikuler. Catatan hasil pemantauan tersebut disampaikan terhadap pimpinan sekolah untuk

memperoleh tanggapan yang sepatutnya dalam upaya memajukan sekolah.[29]

2) Fungsi Komite Sekolah

Untuk menjalankan perannya itu, komite sekolah memiliki beberapa fungsi menurut Kepmendiknas adalah sebagai berikut:

a) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perseorangan. Organisasi, dunia usaha, dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
b) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
c) Menampung dan menganalis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
d) Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah atau DPRD mengenai:
   (1) Kebijakan dan program pendidikan
   (2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
   (3) Kriteria kinerja satuan pendidikan
   (4) Kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru atau tutor dan kepala satuan pendidikan
   (5) Kriteria fasilitas pendidikan
   (6) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan

[29] Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal.243-244

e) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan

f) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan

g) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.[30]

Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi komite sekolah pada tingkat sekolah pada intinya adalah untuk memberi motivasi terhadap orang tua siswa dan masyarakat agar berpartisipasi secara proaktif dalam pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Selain itu sebagai pemberi dorongan, komite sekolah juga memiliki fungsi sebagai mediator atau penghubung antara pemerintah dengan masyarakat.

Strategi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Keterlibatan secara individual, seperti membuka kesempatan dan konsultasi seluas-luasnya bagi orang tua peserta didik untuk datang ke sekolah/ madrasah.

[30] Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*..., hal. 268

2) Keterlibatan secara organisatoris, yaitu keterlibatan melalui komite sekolah/ madrasah, organisasi alumni, dunia usaha/ kerja, dan melalui hubungan dengan instansi lain.[31]

Lebih lanjut dijelaskan bahwa bentuk keterlibatan masyarakat secara organisatoris, misalnya untuk kegiatan pembangunan fisik, orang tua peserta didik yang arsitektur diminta bantuannya membuat *design* bangunan, pemusik, pelukis, dramawan, dan olahragawan dilibatkan dalam kegiatan ekstra kurikuler, praktisi hukum dilibatkan dalam masalah hukum, tata tertib dan profesilain yang mendukung kemajuan lembaga pendidikan.

Madrasah dan masyarakat merupakan dua komunitas yang saling melengkapi bahkan ikut memberikan warna terhadap perumusan model pembelajaran tertentu di madrasah. Madrasah mempunyai peran dalam proses pelestarian dan pemindahan nilai-nilai kultur pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan agama yang dianut para guru dan peserta didiknya kepada generasi penerus.

B. Tinjauan Manajemen Berbasis Sekolah

1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen sekolah menurut Sahertian, berarti penataan dengan pendayagunaan sumber-sumber potensial baik yang bersifat manusia maupun yang bersifat non manuasia guna mencapai tujuan sekolah. Ada

[31] Baharuddin, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 91

dua aspek manajemen sekolah ialah, manajemen proses dan manajemen substantif. Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang diterapkan di Indonesia adalah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).[32]

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan padanan kata dari *School Based Management* (SBM). Bank dunia telah memberikan pengertian bahwa MBS adalah desentralisasi level otoritas penyelenggaraan sekolah kepada level sekolah. Tanggung jawab dan pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan sekolah telah diserahkan kepada kepala sekolah, guru-guru, para orang tua siswa, kadang-kadang peserta didik atau siswa dan anggota komunitas sskolah yang lainnya.[33]

MBS dalam pengertian yang sama dikemukakan oleh Myers dan Stonehill adalah strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan mentransfer otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari pemerintah pusat dan daerah ke sekolah-sekolah secara individual. MBS memberi kepala sekolah, guru, siswa, orang tua dan masyarakat untuk memiliki kontrol yang lebih besar dalam proses pendidikan dan memberikan mereka tanggung jawab untuk mengambil keputusan tentang anggaran, personil dan kurikulum. Dengan keterlibatan stakeholder lokal

---

[32] Budi Wiratno, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan,* (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial vol. 26 no. 1, 2016)

[33] Suparlan, *Manajemen Berbasis Sekolah Dari Teori Sampai dengan Praktek,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 49

dan pengambilan keputusan dalam MBS dapat meningkatkan lingkungan belajar yang efektif bagi siswa.[34]

MBS merupakan salah satu model manajemen pendidikan yang berbasis pada otonomi atau kemandirian sekolah dan aparat daerah dalam menentukan arah, kebijakan, serta jalannya pendidikan di daerah masing-masing. Oleh karena itu, keberhasilan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sangat ditentukan oleh perwujudan kemandirian manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten dan kota. Di samping itu, MBS juga merupakan model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan.[35]

MBS dapat didefinisikan sebagai suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu.

2. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah

MBS memiliki karakteristik yang mesti harus dipahami oleh penyelenggara pendidikan pada era desentralisasi ini. Oleh karena itu, untuk menerapkan MBS, sekolah perlu memiliki sejumlah karakteristik dari MBS tersebut supaya sekolah lebih efektif. Karakteristik MBS bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan

---

[34] Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi*, (Jakarta: Grasindo, 2003), hal. 31-32

[35] Hasbullah, *Otonomi Pendidikan...*, hal. 65-67

kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya dan administrasi.[36]

Karakteristik MBS menurut Nurkholis mencakup karakteristik output yang diharapkan, proses dan input. Untuk lebih jelasnya dapat diterangkan berikut:

a. Output yang diharapkan

   Sekolah harus memiliki output yang diharapkan, yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Output bisa berupa prestasi akademik dan non akademik.

b. Proses

   Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

   1) Proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi

      Menekankan pada pemberdayaan peserta didik.

   2) Kepemimpinan sekolah yang kuat

      Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap.

   3) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib

[36] E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Strategi dan Implementasi*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2005). Hal. 29

Sekolah yang efektif selalu menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan tertib melalui pengupayaan faktor-faktor yang dapat menumbuhkan iklim tersebut.

4) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif

   Pada pengembangan tenaga kependidikan, hal tersebut harus dilakukan secara terus menerus mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesat.

5) Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat

   Makin tinggi tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggung jawab, makin besar pula tingkat dedikasinya.

6) Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan

   Sekolah harus selalu dapat membaca lingkungan dan menanggapinya secara cepat dan tepat.

7) Komunikasi yang baik

   Dengan memiliki komunikasi yang baik keterpaduan semua kegiatan sekolah dapat diupayakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sekolah yang telah ditentukan.

8) Sekolah memiliki akuntabilitas

   Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

9) Memiliki harapan prestasi yang tinggi

Mempunyai dorongan dan harapan yang tinggi untuk meningkatkan prestasi peserta didik dan sekolahnya. Kepala sekolah memiliki komitmen dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan mutu sekolah secara optimal.

10) Fokus pada pelanggan

Pelanggan, terutama siswa, harus menjadi fokus dari semua kegiatan sekolah. Artinya, semua input dan proses yang dikerahkan di sekolah tujuan utamanya adalah meningkatkan mutu dan kepuasan peserta didik.[37]

c. Input pendidikan

Input penidikan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas
2) Sumber daya tersedia dan siap
3) Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi
4) Memiliki harapan prestasi yang tinggi
5) Fokus pada pelanggan
6) Input manajemen.[38]

3. Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah

Teori yang digunakan MBS untuk mengelola sekolah didasarkan pada empat prinsip yaitu:

a. Prinsip Ekuifinalitas

[37] Rohiat, *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik dilengkapi dengan Contoh Rencana Strategi dan Rencana Operasional,* (Bengkulu: Refika Aditama, 2008), Hal. 58-64

[38] Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah...,* hal.64-66

Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. MBS menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi mereka masing-masing.

b. Prinsip Desentralisasi

Desentralisasi adalah gejala yang penting dalam reformasi manajemen sekolah modern. Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tak dapat lepas dari kesulitan dan permasalahan. Oleh karena itu, sekolah harus diberi kekuasaan dan tanggung jawab untuk memecahkan masalahnya secara efektif dan secepat mungkin ketika masalah itu muncul. Dengan kata lain, tujuan prinsip desentralisasi adalahefisiensi dalam pemecahan masalah, bukan menghadiri

masalah.

c. Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri

MBS menyadari pentingnya untuk mempersilakan sekolah menjadi sistem pengelolaan secara mandiri di bawah kebijakannya sendiri. Sekolah memiliki otonomi tertentu untuk mengembangkan tujuan pengajaran, strategi manajemen, distribusi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, memecahkan masalah dan mencapai tujuan berdasarkan kondisi mereka masing-masing. Karena sekolah dikelola

secara mandiri maka mereka lebih memiliki inisiatif dan tanggung jawab.

d. Prinsip Inisiatif Manusia

Perspektif sumber daya manusia menekankan bahwa orang adalah sumber daya berharga di dalam organisasi sehingga poin utama manajemen adalah mengembangkan sumber daya manusia di dalam sekolah untuk berinisiatif. Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia harus digali, ditemukan, dan kemudian dikembangkan.[39]

4. Tujuan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

Sebagai salah satu konsep dan paradigma baru pendidikan di era otonomi, MBS berupaya terwujudnya sistem pendidikan yang memberdayakan demokratisasi yang berorientasi pada kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab sekolah. Dari sinilah tujuana utam MBS diperoleh yaitu untuk membuat sekolah lebih independen dan terus menerus meningkatkan kinerja sekolah terutama peningkatan output pendidikan melalui proses belajar mengajar yang bermutu.

Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu dapat diperoleh melalui

[39] Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah*..., hal. 52-55

partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah.[40]

Sementara itu menurut Departemen Pendidikan Nasional, tujuan MBS adalah: *pertama,* meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. *Kedua,* meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui keputusan bersama. *Ketiga,* meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada sekolahnya. *Keempat,* meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.[41]

MBS bertujuan meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan prinsip-prinsip tata pengelolaan sekolah yang baik.

a. Pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah, sekolah akan lebih inisiatif dan kreatif dalam meningkatkan mutu sekolah.
b. Pemberian keluwesan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber dayanya, sekolah akan lebih luwes dan lincah dalam mengadakan dan memanfaatkan sumber daya sekolah secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah.

---

[40] E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*..., hal. 27
[41] Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah*..., hal.27

c. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya sehingga personil sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya.
d. Sekolah lebih mengetahui kebutuhannya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
e. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.
f. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif jika dikontrol oleh masyarakat setempat.
g. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.
h. Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik dan masyarakat pada umumnya. Sehingga diharapkan sekolah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.
i. Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain dalam peningkatan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif yang didukung oleh orangtua, peserta didik, masyarakat sekitar, dan pemerintah daerah setempat.

j. Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat.[42]

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat, bertujuan meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu didapat melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Sedangkan peningkatan pemerataan melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu.

5. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Mengimplementasikan MBS semua komponen sekolah harus meningkatkan kinerja dan profesionalisme kerja dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Hal ini sangat diperlukan karena untuk mencapai tujuan pendidikan, output yang diperoleh dari proses pendidikan harus memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Itu semua tidak terlepas dari peranan sekolah, seperti kepala sekolah, komite sekolah dan orang tua.

---

[42] Rohiat, *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik...*, hal. 48-51

Menurut Nurkolis implementasi MBS akan berhasil melalui strategi-strategi sebagai berikut:

a. Sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal, yaitu dimilikinya otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara kesinambungan, akses informasi ke segala bagian dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil.
b. Adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, proses pengambilan keputusan.
c. Adanya kepemimpinan sekolah yang kuat sehingga mampu menggerakkan dan mendayagunakan sumber daya sekolah secara efektif.
d. Adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam dewan sekolah yang aktif.
e. Semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh.
f. Sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimalnya diwujudkan dalam laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap semua *stakeholder*.
g. Penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah untuk meningkatkan pencapaian belajar siswa.

h. Implementasi diawali dengan sosialisasi konsep MBS, identifikasi peran masing-masing.[43]

Dalam rangka mengimplementasikan MBS secara efektif dan efisien maka sekolah harus melibatkan semua unsur yang ada mulai dari kepala sekolah, orang tua, masyarakat, sarana prasarana serta unsur terkait lainnya. Melalui era otonomi pendidikan, keluarga dan masyarakat bukan lagi pihak yang pasif hanya penerima keputusan-keputusan dalam penyelenggaraan pendidikan. Tetapi mereka harus aktif menentukan dan membuat program bersama sekolah dan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam program-program sekolah, dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi, karena pada hakikatnya komunikasi adalah salah satu bentuk keterlibatan berarti partisipasi aktif masyarakat di dalam program dan kegiatan sekolah.

Keikutsertaan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan mempunyai banyak keuntungan, diantaranya yaitu:

a. Pencapaian akademik dan perkembangan kognitif siswa dapat berkembang secara signifikan.
b. Orang tua dapat mengetahui perkembangan anaknya dalam proses pendidikan di sekolah.
c. Orang tua akan menjadi guru yang baik di rumah dan bisa menerapkan formula-formula positif untuk pendidikan anaknya.

[43] Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah...*, hal.132-134.

d. Akhirnya orang tua memiliki sikap dan pandangan positif terhadap sekolah.

Faktor Pendukung Kesuksesan Implementasi MBS suatu program yang dicanangkan tidak akan berjalan dan berhasil secara maksimal apabila tidak tersedia berbagai faktor pendukung. Faktor pendukung bisa berasal baik dari internal maupun eksternal. Dalam implementasi MBS, secara luas dan mendasar yang amat diperlukan adalah dukungan politik baik itu sekedar *political will* maupun dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan formal. Dukungan finansial, dukungan sumber daya manusia beserta pemikirannya, dan sarana prasarana lainnya juga menjadi faktor pendukung yang penting.

Akhirnya, banyak waktu dan tenaga yang dicurahkan oleh para partisipan sekolah dalam implementasi MBS yang belum komplet tersebut. Konsekuensinnya adalah munculnya kefrustasian, ketidakpuasan, menghabiskan tenaga dan akhirnya segera kembali kepada pola sebelumnya. Dampak dari kesalahan semacam ini adalah menurunkan kepercayaan lembaga untuk mengubah dirinya menuju masa depan.

Oleh karena itu, pada tahap awal inisiasi MBS harus dipersiapkan program sosialisasi yang matang agar berbagai pihak yang terkait dengan pelaksnaaan pendidikan di sekolah menyadari akan arti pentingnya implementasi MBS. Setelah timbul kesadaran itu maka langkah selanjutnya adalah memberikan pelatihan teknis implementasi MBS.[44]

---

[44] *Ibid.*, hal. 130-131

Untuk merumuskan implementasi manajemen berbasis sekolah harus ada tahapan-tahapan seperti:

a. Perencanaan Pada langkah awal perumusan MBS, hal-hal yang perlu dilaksanakan adalah:
   1) Mengidentifikasi sistem, budaya dan sumber daya, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus diubah dengan memperkenalkan terlebih dahulu format yang baru dan tentunya lebih baik.
   2) Membuat komitmen secara rinci yang diketahui oleh semua unsur yang bertanggung jawab, jika terjadi perubahan sistem, budaya dan sumberdaya yang cukup mendasar.
   3) Hadapilah penolakan terhadap perubahan dengan memberi pengertian akan pentingnya perubahan demi mencapai tujuan bersama.
   4) Berkerja dengan semua unsur sekolah dalam menjelaskan atau memaparkan visi dan misi.
   5) Menggaris bawahi prioritas sistem, budaya dan sumber daya yang belum ada dan sangat diperlukan.
b. Mengidentifikasi Tantangan Nyata sekolah pada umumnya tantangan sekolah bersumber pada output (lulusan) sekolah yang meliputi kualitas, produktifitas, efektabilitas dan efisiensi. Maka sangat diperlukan identifikasi dari hasil analisis output untuk mengetahui

tingkat kualitas, produktifitas, efektibilitas dan efisiensi dari output yang dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan.

c. Merumuskan visi, misi, tujuan sasaran sekolah yang dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah. Yang dikatakan sasaran adalah penjabaran tujuan yang akan dicapai oleh sekolah dalam jangka waktu lebih pendek dibandingkan dengan tujuan sekolah. Rumusannya harus berupa peningkatan yang spesifik, terukur, jelas kriterianya dan disertai indikator yang rinci.
d. Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Fungsi-fungsi yang dimaksud adalah unsur-unsur kegiatan beserta unsur-unsur pendukungnya yang saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Sejauh mana kesiapan fungsi-fungsi tersebut terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran.
e. Melakukan analisis potensi lingkungan (analisis SWOT), analisis SWOT dilakukan dengan maksud untuk mengenali kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi sekolah yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
f. Memilih langkah-langkah alternatif pemecahan persoalan. Dalam setiap kegiatan dimungkinkan adanya permasalahan yang timbul. Hendaklah kita tidak menghindari masalah akan tetapi harus kita hadapi dengan solusi pemecahan yang sudah kita rencanakan sebelumnya.
g. Menyusun Rencana Program Peningkatan Mutu. Penyusunan program peningkatan mutu harus disertai langkah-langkah pemecahan persoalan

yang mungkin terjadi. Fungsi yang terlibat beserta unsur-unsurnya membuat rencana program untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta bersama-sama merealisasikan rencana program tersebut.

h. Melaksanakan Rencana Program Peningkatan Mutu, Dalam melaksanakan rencana peningkatan mutu maka fungsi-fungsi terkait hendaknya memanfaatkan sumber daya secara maksimal, efektif dan efisien.

i. Melakukan evaluasi pelaksanaan, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, sekolah perlu mengadakan evaluasi pelaksanaan program, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang.

j. Merumuskan sasaran peningkatan mutu baru.

Pelaksanaan MBS merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus dan melibatkan semua unsur yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1) Mensosialisasikan konsep MBS ke seluruh warga sekolah melalui seminar, diskusi, forum ilmiah, dan media massa.
2) Melakukan analisis situasi sekolah dan luar sekolah yang hasilnya berupa tantangan nyata yang harus dihadapi oleh sekolah.
3) Merumuskan tujuan situsional yang akan dicapai dari pelaksanaan MBS berdasarkan tantangan yang dihadapi.

4) Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan melalui analisis SWOT.
5) Memilih langkah-langkah pemecahan persoalan.
6) Membuat rencana jangka pendek, menengah dan panjang beserta program-programnya untuk merealisasikan rencana tersebut.
7) Melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana jangka pendek MBS.
8) Melakukan pemantauan terhadap proses dan evaluasi terhadap hasil MBS.

C. Partispasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah

1. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Dalam iklim yang kompetitif sekarang ini, sulit bagi organisasi untuk dapat hidup dengan baik jika tidak memiliki kemampuan untuk mengubah diri dengan cepat dan mampu berkembang seiring dengan berbagai tuntutan *stakeholder*. Kondisi ini berlaku hampir pada keseluruhan organisasi baik yang bersifat profit maupun nonprofit. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang termasuk lembaga nonprofit juga tidak terlepas dari fenomena ini, itulah sebabnya dalam banyak hal

lembaga pendidikan harus mengetahui berbagai harapan dan kebutuhan *stakeholder.*[45]

Perkembangan masyarakat Indonesia yang menjadi modern menuntut keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. Oleh kaena itu, keleluasaan atau kebebasan yang seluasnya-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat termasuk unsur-unsur yang ada didalamnya seperti perseorangan, kelompok atau badan untuk melaksanakan peran serta dalam pendidikan nasional. Untuk menunjukkan keleluasaan bagi masyarakat dan berpartisipasi dalam pendidikan nasional terdapat berbagai kegiatan masyarakat diidentifikasikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan tercantum dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:

a. Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah
b. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan pelatihan peserta didik

[45] Muhaimin, *Manajemen Pendidikan; Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana pengembangan Sekolah/ Madrasah,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 23

c. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, penelitian dan pengembangan
d. Pengadaan atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional
e. Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa dan bentuk lainnya yang sejenis
f. Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar
g. Pemberian kesempatan untuk magang atau latihan kerja
h. Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional
i. Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan penyelenggaraan pengembangan pendidikan
j. Pemberian bantuan dalam bentuk kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan
k. Keikutsertaan dalam program pendidikan atau penelitian yang diselenggarakan oleh Pemerintah di dalam atau di luar negeri.[46]

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat tersebut perlu disosialisasikan secara luas karena selama ini baru nampak partisipasi

[46] Hardiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 86

masyarakat berupa pengadaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan atau program pendidikan. Maka dari itu, pemerintah perlu memberikan dorongan dan motivasi agar bentuk partisipasi masyarakat lebih meningkat.

Ada beberapa bentuk keterlibatan yang bisa digunakan sekolah-sekolah yang efektif, melalui kunjungan keluarga, pertemuan dengan orang tua siswa, sukarelawan masyarakat yang menaruh perhatian dalam dunia pendidikan dan perwakilan masyarakat pada panitia penasihat atau pertimbangan pendidikan.

Seperti yang dikemukakan oleh Clark untuk mengajak orang tua dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pendidikan. Pertama, *pendekatan school-based* dengan cara mengajak orang tua siswa datang ke sekolah melalui pertemuan-pertemuan, konferensi, diskusi guru-orang tua dan mengunjungi anaknya sedang belajar di sekolah. Kedua, *home-based* dengan cara orang tua mengawasi anaknya yang sedang belajar dan ikut membantu dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran.[47]

Masyarakat sebagai suatu komunitas yang dapat memberi warna terhadap madrasah memberi perhatian dalam upaya pengembangan rencana strategis lembaga tersebut. Menurut Gaventa dan Valderma9 bahwa ada tiga tradisi konsep partisipasi bila dikaitkan dengan

[47] Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah*..., hal. 126

pembangunan masyarakat yang demokratis, yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga.[48]

Partisipasi politik seringkali dihubungkan dengan proses politik yang demokratik, yang melibatkan interaksi perseorangan dan organisasi, biasanya partai politik dengan negara. Partisipasi politik dihubungkan dengan demokrasi politik yang mengedepankan prinsip perwakilan dan partisipasi langsung diungkapkan dalam tindakan seorang individu atau kelompok terorganisasi untuk melakukan pemungutan suuara, kampanye, protes atau mempengaruhi wakil-wakil pemerintah.

Partisipasi sosial lebih berorientasi pada perencanaan dan implementasi pembangunan. Partisipasi ini ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang terkait dengan proses pembangunan dalam konsultasi data pengambilan keputusan pada semua tahapan siklus proyek pembangunan dari implementasi, pemantauan dan evaluasi. Ada beberapa asumsi yang dipakai untuk mendorong partisipasi sosial yaitu: 1) Rakyatlah yang paling tahu kebutuhannya maka rakyatlah yang mempunyai hak untuk menentukan pembangunan di lokalnya, 2) Partisipasi ini dapat menjamin kepentingan dan suara-suara kelompok yang selama ini dimarjinalkan, 3) Partisipasi sosial dalam pengawasan terhadap proses pembangunan dapat menjamin tidak terjadinya berbagai penyimpangan, penurunan kualitas dan kuantitas pembangunan.

---

[48] Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat...*, hal. 53

Partisipasi masyarakat, menekankan pada "partisipasi langsung" warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

Ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan sebagaimana yang diungkapkan oleh Baharuddin sebagai berikut:[49]

a. Partisipasi dalam Komite Madrasah

Menurut UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3, komite sekolah/ madrasah adalah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Lebih lanjut Sagala menjelaskan bahwa kontribusi komite sekolah/ madrasah antara lain menyangkut:[50]

1) Penyusunan perencanaan strategik sekolah/madrasah, yaitu strategi pembangunan sekolah/ madrasah untuk perspektif 3-4 tahun ke depan.
2) Penyusunan perencanaan tahunan sekolah/ madrasah.

---

[49] Baharuddin, *Manajemen Pendidikan Islam*..., hal. 93
[50] Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik*..., hal. 241

3) Mengadakan pertemuan terjadwal untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi dan ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite sekolah/ madrasah.
4) Memikirkan upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk memajukan sekolah/ madrasah terutama yang menyangkut fasilitas.
5) Mendorong sekolah/ madrasah melakukan *internal monitoring (school self assessment)* dan melaporkannya untuk dibahas dalam forum komite sekolah/madrasah.
6) Membahas hasil-hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga eksternal dalam upaya menjaga *quality assurance.*
7) Membahas laporan tahunan sekolah/ madrasah sehingga memperoleh gambaran yang tepat atas penerimaan komite sekolah/madrasah

b. Partisipasi dalam Dewan Pendidikan

Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Dilihat dari aspek legalitasnya, Dewan Pendidikan menjadi lebih kuat karena telah diwadahi dalam pasal 56 ayat 2 Undang-undang No. 20 tahun 2003, yang menegaskan bahwa: Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dengan memberikan pertimbangan, arah dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat

nasional, provinsi dan kabupaten/ kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis.

2. Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat

Banyak pakar yang menulis tentang partisipasi masyarakat dalam upaya kegiatan pembangunan. Menurut salah seorang pakar, ada bermacam-macam tingkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan, termasuk di bidang pendidikan, mulai dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi seperti rincian berikut ini:

a. Hanya dalam menggunakan jasa pelayanan yang tersedia, misalnya memasukkan anak ke sekolah.
b. Partisipasi dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga.
c. Partisipasi dalam bentuk keikutsertaan, yang berarti menerima secara pasif apa yang telah diputuskan oleh pihak lain. Misalnya, BP3 memutuskan orang tua membayar iuran bagi setiap anak sekolah dan orang tua menerima keputusan ini dengan mematuhinya.
d. Partisipasi melalui konsultasi mengenai hal-hal tertentu. Misalnya, kepala sekolah berkonsultasi dengan BP3 tentang program sekolah dan orang tua murid mengenai masalah pendidikan anak-anak mereka
e. Keterlibatan dalam memberikan pelayanan tertentu, biasanya sebagai mitra pihak lain. Misalnya, orang tua murid mewakili sekolah bersama dengan puskesmas mengadakan penyuluhan pada masyarakat tentang perlunya menjaga gizi anak dalam pendidikan, sarapan pagi sebelum ke sekolah.

f. Keterlibatan sebagai pelaksana kegiatan yang telah didelegasikan. Misalnya, sekolah meminta BP3 dan orang tua tertentu memberikan penyuluhan pada masyarakat tentang pentingnya pendidikan, mencatat anak usia sekolah.

g. Partisipasi yang sebenarnya dalam pengambilan keputusan pada berbagai jenjang. Misalnya, BP3 atau orang tua ikut serta membicarakan dan mengambil keputusan tentang rencana kegiatan sekolah, baik kegiatan maupun pendanaannya.

Prakteknya sekarang kita mengenal adanya partisipasi masyarakat melalui keterlibatan BP3 atau POMG, namun kegiatannya hanya seputar soal dana, sarana atau bidang fisik saja. Pada sekolah swasta, partisipasi masyarakat lebih menonjol daripada sekolah negeri, karena keberadaan sekolah swasta sangat tergantung kepada bantuan keuangan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat hanya dalam menerimanya yang telah diputuskan, bukan ikut ambil bagian dalam mengambil keputusan. Untuk itu, MBS nantinya sangat menekankan kepada partisipasi masyarakat dalam turut merencanakan, melaksanakan sebagian program sampai kepada pengambilan keputusan bersama sekolah.

Konsep MBS, partisipasi masyarakat, orang tua dan sebagainya sangat luas, meliputi antara lain:

1) Memberikan dukungan dana, atau sumbangan yang berupa fisik saja.

2) Merencanakan kegiatan dan kemungkinan pendanaan kegiatan-kegiatan tersebut.
3) Ikut menambah guru yang tidak ada atau kurang, bahkan menjadi guru pengganti. Misalnya, guru agama, kesenian, pramuka. Jadi, masyarakat benar-benar merupakan mitra sejajar sekolah (kepala sekolah dan guru) yang ikut terlibat secara aktif memikirkan kemajuan sekolah.
4) Memberikan masukan dan mendiskusikan pelaksanaan pembelajaran, kinerja para guru, prestasi belajar anak, kendala yang dihadapi.
5) Pelaksanaan partisipasi masyarakat yang sudah ideal, masyarakat juga dapat terlibat dalam memilih dan memasukkan guru-guru yang diperlukan sekolah, serta memberhentikan guru yang prestasinya tidak memuaskan.[51]

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah, sebagai berikut:

a. Jenis kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria akan berbeda dengan partisipasi wanita. Hal ini disebabkan karena adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat yang membedakan

[51] Supriono, *Manajemen Berbasis Sekolah,* (Surabaya: Anggota IKAPI Cabang Jatim, 2001), hal. 13-15

kedudukan dan derajat pria antara wanita, sehingga menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban.

b. Usia

Terdapat perbedaan di dalam masyarakat, seperti kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga memunculkan golongan tua dan golongan muda yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan. Usia produktif juga sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

c. Tingkat pendidikan

Faktor pendidikan juga mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi, karena dengan latar belakang pendidikan yang diperoleh, seorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar terhadap inovasi pendidikan serta memiliki rasa tanggung jawab tinggi kualitas pendidikan.

d. Tingkat penghasilan

Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan serta, tingkat pendapatan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk partisipasi dalam pendanaan sekolah dan berinvestasi untuk kemajuan sekolah.

e. Mata pencaharian (pekerjaan)

Jenis pekerjaan seorang akan menentukan tingkat penghasilan dan mempengaruhi waktu luang seseorang yang dapat digunakan

untuk berpatisipasi, misalnya menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan sekolah untuk membicarakan rencana program-program sekolah mulai dari jangka pendek, menengah sampai dengan jangka panjang. Selain itu mempengaruhi kesanggupan masyarakat khususnya orang tua dalam menanggung biaya pendidikan anak.[52]

Para pendidik profesional setuju bahwa masyarakat, terutama orang tua memberikan sumbangan penting bagi pekerjaan mereka. Partisipasi yang diminta biasanya berupa dukungan dari masyarakat atas apa yang sedang dicoba dilakukan madrasah, yakni para guru dan kepala madrasah. Oleh karena itu, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dianggap sebagai kegagalan masyarakat untuk menghargai nilai pendidikan. Pendidikan harus dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan produksi masyarakat, sekolah-sekolah membantu memikul biaya operasionalnya sendiri dan menjadi bagian integral dalam komunitas yang mereka layani.

Adapun sifat dan ciri-ciri partisipasi masyarakat antara lain:

1) Partisipasi bersifat sukarela
2) Berbagai issu dan masalah haruslah disajikan dan dibicarakan secara jelas dan objektif
3) Kesempatan untuk berpatisipasi haruslah mendapat keterangan informan yang jelas dan memadai, tentang setiap segi atau aspek dari program yang akan dilaksanakan

[52] St. Rodliyah, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hal. 56-57

4) Partisipasi masyarakat dalam rangka menentukan kepercayaan terhadap diri sendiri haruslah menyangkut beberapa ringkasan dan berbagai sektor, bersifat dewasa, penuh arti, berkesinambungan dan aktif.

4. Implementasi Partisipasi Masyarakat

Sangat penting bagi sekolah untuk menjalankan peranan kepemimpinan yang aktif dalam menggalakkan program-program sekolah melalui partisipasi masyarakat. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan program sekolah, diantaranya:

a. Menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat

Partisipasi masyarakat akan tumbuh jika masyarakat juga merasakan manfaat dari keikutsertaannya dalam program sekolah. Manfaat dapat diartikan luas, termasuk rasa diperhatikan dan rasa puas karena dapat menyumbangkan kemampuan bagi kepentingan sekolah.

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk membangun komunikasi dengan masyarakat, yaitu:

1) Mengidentifikasi orang-orang kunci, yaitu orang-orang yang mampu mempengaruhi teman lain. Orang-orang itulah yang tahap pertama dihubungi, diajak konsultasi dan diminta bantuannya untuk menarik orang lain berpartisipasi dalam program sekolah. Tokoh-tokoh semacam ini dapat berasal dari orang tua siswa atau

warga masyarakat yang “dituakan” atau “*informal leader*”, pejabat, tokoh bisnis dan profesi lainnya.

2) Melibatkan orang-orang kunci tersebut dalam kegiatan sekolah, khususnya yang sesuai dengan minatnya. Misalnya, tokoh seni dapat dilibatkan dalam pembinaan kesenian di sekolah. Orang yang hobi olahraga dapat dilibatkan dalam program olahraga sekolah. Selanjutnya tokoh-tokoh tersebut diperankan sebagai mediator dengan masyarakat luas.

b. Melibatkan masyarakat dalam program sekolah

Sekolah harus mengenalkan program dan kegiatannya kepada masyarakat, Program tersebut harus tampak manfaat yang diperoleh masyarakat jika membantu program sekolah. Untuk maksud diatas, sekolah dapat melakukan:

1) Melaksanakan program-program kemasyarakatan, misalnya kebersihan lingkungan, membantu lalu lintas di sekitar sekolah dan sebagainya. Program sederhana semacam ini dapat menumbuhkan simpati masyarakat.

2) Mengadakan *open house* yang memberi kesempatan masyarakat luas mengetahui program dan kegiatan sekolah. Tentu saja dalam kesempatan semacam itu sekolah perlu menonjolkan program-program yang menarik minat masyarakat.

3) Mengadakan buletin sekolah atau majalah atau lembar informasi yang secara berkala memuat kegiatan dan program sekolah, untuk dinformasikan kepada masyarakat.
4) Mengundang tokoh untuk menjadi pembicara atau pembina suatu program sekolah. Misalnya, mengundang dokter yang tinggal di sekitar sekolah atau orang tua untuk menjadi pembicara atau pembina program kesehatan sekolah.
5) Membina program kerja sama sekolah dengan masyarakat, misalnya perayaan hari-hari nasional maupun keagamaan.

c. Membentuk dewan sekolah

Keberadaan dewan sekolah akan menjadi penentu dalam pelaksanaan otonomi pendidikan di sekolah. Melalui dewan sekolah orang tua dan masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan pendidikan di sekolah, untuk meningkatkan komitmen partisipasi masyarakat dalam menjungjung pendidikan, termasuk dari dunia usaha perlu dilakukan antara lain, sebagai berikut:

1) Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pendidikan, terutama di tingkat sekolah. Melalui otonomi, pengambilan keputusan yang menyangkut pelaksanaan layanan jasa pendidikan akan semakin mendekat kepentingan masyarakat yang dilayani.

2) Mengembangkan kegiatan sponsorship bagi kegiatan pendidikan.[53]

Silaturahmi orang tua juga menjadi salah satu upaya dalam menggalang partisipasi orang tua dan masyarakat. Silaturahmi merupakan ciri khas dalam upaya yang dikembangkan dalam menggalang partisipasi masyarakat karena silaturahmi sesuai karakter sekolah. Himbauan atau ajakan kepada orang tua dan masyarakat untuk bisa membackup, karena keberhasilan itu bukan keberhasian seseorang tetapi sesumgguhmya banyak faktor yang mendukung dalam keberhasilan tersebut.[54]

5. Kendala Partisipasi Masyarakat

Kendala yang dialami oleh sekolah untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS membuktikan, belum sepenuhnya disadari sebagai tanggung jawab bersama. Realitas tersebut menguatkan asumsi sepenuhnya bahwa partisipasi tidak mudah diwujudkan, karena ada kendala yang bersumber dari orang tua maupun masyarakat diantaranya adalah:

1) Budaya paternalism yang dianut oleh masyarakat menyulitkan untuk melakukan diskusi secara terbuka,
2) Tidak adanya *trust* masyarakat kepada sekolah.[55]

---

[53] N Fattah, *Manajemen Berbasis Sekolah: Strategi Pemberdayaan Sekolah dalam Rangka Peningkatan Mutu dan Kemandirian Sekolah,* (Bandung: Andira, 2000), hal. 56-58

[54] Budi Wiratno, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan...,*

[55] Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat...,* hal.197-198

C. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi yang hendak dilakukan, berikut adalah tabel penelitiannya:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Bustanul Arifin, Tesis, *Peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan (studi kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan Jogorogo Ngawi)*	Variabel yang diteliti, yaitu peran masyarakat	Mengarah pada peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan diarahkan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS	(1) Peran masyarakat dalam wadah komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai pengambil keputusan, masyarakat diajak musyawarah dalam kegiatan-kegiatan madrasah, sebagai pelaksana, masyarakat bergotong royong membantu membangun sarana prasarana gedung ruang kelas sesuai dengan kesepakatan awal sebelum pelaksanaan pengerjaan, peran sebagai pengambil manfaat, peningkatan jumlah kelulusan dan adanya peningkatan jumlah prosentasi program yang terlaksana, peran sebagai evaluasi, tahap evaluasi yang dilakukan atas program yang dilakukan dan (2) Peran masyarakat dalam wadah dewan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai pendukung, adanya bantuan berupa alat-alat keperluan yang harus dimiliki bagi madrasah untuk penyelenggaraan pendidikan. Sebagai mediator, masyarakat memberikan pengawasan kepada dewan pendidikan yang ada di DPRD kabupaten tentang pencairan

				dana yang akan diberikan madrasah. Sebagai pertimbangan, adanya musyawarah dalam membentuk paguyuban wali murid, sebagai pengontrol, pemberian pengawasan dan evaluasi atas program yang telah dilakukan seperti dalam rapat atau saat pelaksanaan program madrasah.
2.	HanaTitisar, Skripsi, *Peran keterlibatan komite sekolah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 3 Semarang*	Terletak dalam hal meneliti tentang pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah	Variabel yang diteliti sebelumnya adalah peran komite sekolah, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah partisipasi masyarakatnya dengan melihat pada bentuk, implementasi dan kendalanya dalam melaksanakan MBS	Peran komite sekolah di SMA Negeri 3 Semarang sudah cukup baik sebagai badan pertimbangan komite sekolah memberikan masukan-masukan dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan pendidikan sekolah. Komite sekolah juga memberikan pertimbangan kepada sekolah terkait dengan tenaga kependidikan yang diperbantukan untuk sekolah. Dalam peningkatan mutu guru, komite sekolah juga memberikan pertimbangan untuk guru-guru agar meningkatkan kompetensinya dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Sebagai badan pendukung komite sudah berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang diperbantukan untuk sekolah. Sedangkan sebagai badan pengontrol, komite sekolah tiap bulan selalu memantau anggaran dana yang digunakan untuk alokasi dana pendidikan dan juga memantau hasil belajar siswa. Akan tetapi untuk proses KBM tidak dilakukan oleh komite karena itu bukan wewenang dari komite sebagai badan mediator, komite sekolah masih kurang optimal dalam menjalankan perannya. Dikatakan demikian karena belum mampu melakukan

				kerjasama dengan dunia usaha maupun dunia industri sehingga sumber dana yang diperoleh masih memanfaatkan bantuan dari orang tua siswa dengan cara menarik uang komite sekolah atau iuran rutin orang tua siswa. Selain itu, masyarakat kebanyakan belum berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sebagian besar dari orang tua siswa belum memahami tugas-tugas dari komite sekolah. Masyarakat hanya dapat memberi masukan secara materi dan belum sepenuhnya memberikan dukungan secara moril
3.	Diah Arum Kartikasari, Skripsi, *Partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah di SMP Negeri 8 Yogyakarta dan SMP Negeri 15 Yogyakarta*	Terletak pada yang diteliti, yakni partisipasi masyarakat	Penelitian ini mengarah pada partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan diarahkan untuk mengetahui partisipasi masyarakat yang melihat pada bentuk, implementasi dan kendalanya dalam melaksanakan MBS	Partisipasi bentuk sukarela, pengambilan keputusan, pemikiran dan pembiayaan. Faktor pendukung partisipasi di SMP Negeri 8 Yogyakarta adalah hubungan baik dengan sekolah, kepedulian orang tua yang tinggi, komitmen sekolah yang tinggi dan koordinasi baik dengan komite sekolah. Sedangkan di SMP Negeri 15 Yogyakarta adalah hubungan baik dengan sekolah, keterbukaan sekolah dan dukungan orang tua yang kuat. Faktor penghambat partisipasi di SMP Negeri 8 Yogyakarta adalah sebagian kecil orang tua masih belum paham dan keterbatasan waktu orang tua. Sedangkan di SMP Negeri 15 Yogyakarta adalah kurangnya pemahaman orang tua siswa dan kesibukan pekerjaan orang tua. Upaya pihak sekolah mengatasi hambatan di SMP Negeri 8 Yogyakarta adalah komunikasi baik dengan orang tua, penjelasan lebih kepada orang tua dan pelaksanaan program sekolah harus maksimal,

				sedangkan di SMP Negeri 15 Yogyakarta adalah menjelaskan tentang program sekolah dan aktif mengajak orang tua berpartisipasi.
4.	*Lanang Permana, Skripsi, Peran paguyuban orang tua siswa dalam pengembangan sekolah melalui manajemen berbasis sekolah (MBS) di Sekolah Dasar*	Variabel dan masalah yang diteliti, yaitu partisipasi masyarakat yang didalamnya termasuk orang tua dalam melaksanakan MBS	Melihatkan peran paguyuban orang tua dalam pembelajaran PAKEM dan peran dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, sementara penelitian yang akan dilakukan adalah bagaimana bentuk, implementasinya serta kendala partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS	Sumbangan pengembangan sekolah secara sukarela dan keikutsertaan orang tua siswa dalam merencanakan anggaran keuangan sekolah. Peran paguyuban orang tua siswa dalam pengembangan pembelajaran PAKEM meliputi, pendampingan membaca terbimbing, penyediaan alat peraga, memantau belajar anaknya di rumah, pendampingan membaca Al-Qur'an dan mengapresiasi hasil karya siswa melalui pameran. Peran paguyuban orang tua siswa dalam pengembangan sarana dan prasarana sekolah meliputi, sumbangan pendanaan dan tenaga maupun pemikiran dalam pembangunan sarana dan prasarana penunjang KBM. Kendala dalam pelakanaan paguyuban orang tua siswa yaitu, kehadiran, keterbatasan dana dan intensitas pertemuan yang tidak rutin.
5.	Indar Yudhikawati, Skripsi, *Peran kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang*	Masalah yang diteliti yaitu pelaksanaan MBS	Variabel yang diteliti sebelumnya adalah peran komite sekolah, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah partisipasi masyarakatnya dengan melihat pada bentuk, implementasi dan	(1) Peran kepala sekolah dalam penyusunan rencana program MBS yaitu kepala sekolah berperan sebagi *leader*, dimana bertindak sebagai pengambil keputusan sekaligus penanggungjawab keputusan yang telah dibahas dalam rapat sekolah tersebut, (2) Peran kepala sekolah dalam implementasi MBS, kepala sekolah berperan sebagai motivator dan fasilitator dalam kemajuan sekolah, dan (3) Peran kepala sekolah dalam evaluasi, berperan sebagai evaluator dan supervisor, dimana kepala sekolah melakukan pengawasan

			kendalanya dalam melaksanakan MBS	dan pembinaan kepada guru scara kontuinitas berdasarkan acuan MBS dan melakukan pembinaan (supervisi) sebagai tindak lanjut.

Terkait tentang posisi penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang, dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah" dapat disimpulkan bahwa masih perlu mengembangkan penelitian terdahulu. Tidak dapat dipungkiri bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS yang berada di lembaga pendidikan sekolah yang menyesuaikan kebutuhan pendidikan masyarakat membuat lembaga tersebut terus eksis dan berkembang serta mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial dan tuntutan global yang sangat cepat. Mengingat betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS dalam memajukan pendidikan, maka penelitian yang berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan MBS di MTsN 3 Tulungagung" penting untuk dilakukan dan dikaji lebih mendalam.

Letak Kebaharuan dan Keunikan Penelitiannya yaitu: kalau dilihat pada penelitian terdahulu banyak yang hampir sama meneliti serta mengkaji mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS, namun masing-masing penelitian memiliki tujuan dan maksud sendiri-sendiri dan berbeda satu sama lain. Apabila penelitian-penelitian sebelumnya membahas seputar faktor penghambat dan pendukung, kemudian upaya penghambat partisipasi masyarakat yang masih secara umum dan belum menjadi satu kesatuan yang saling terkait dan belum

adanya implementasi dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang sesuai lalu bagaimana mengimplementasikan partisipasi tersebut dalam pelaksanaan MBS serta untuk mengetahui kendala partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS.

D. Paradigma Penelitian

Menurut Sugiyono, paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dan teknik analisis statistik yang akan digunakan.[56] Paradigma penelitian juga disebut sebagai kerangka berfikir. Kerangka berfikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun. Digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat agar peneliti mudah dalam melakukan penelitian.[57]

---

[56] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,* (Bandung; Alfa Beta, 2007), hal. 36

[57] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 3

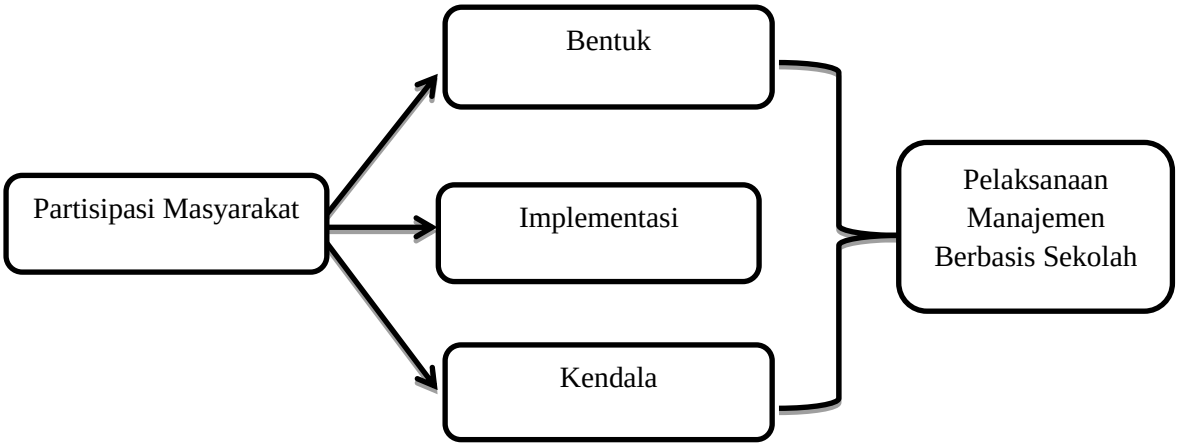

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

Setelah melihat apa yang sudah peneliti sampaikan di atas dapat digambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS di MTsN 3 Tulungagung, tidak lepas dari fokus penelitian yaitu bentuk, implementasi serta kendala partisipasi masyarakat. Sehingga keberhasilan pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dan pemerintah terjun langsung ke tengah-tengah dunia pendidikan atau dapat dikatakan masyarakat turut berpartisipasi dalam pendidikan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, dalam pelaksanaan MBS maka harus didukung oleh peran serta masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Orang tua siswa dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah, orang tua dan masyarakat merumuskan dan mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.